

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Beberapa faktor yang menentukan terciptanya aktifitas dengan baik adalah adanya kondisi keamanan, kestabilan ekonomi dan sosial yang kondusif. Jika ketiga faktor tersebut tidak ada, maka tidak akan mungkin individu atau kelompok bahkan negara dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik dan lancar. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak terrealisasinya keadaan dengan baik antara lain, terjadinya bencana alam, perang ataupun konflik.

Berbicara mengenai bencana alam, tentunya masih melekat di benak kita akan musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Dimana gempa bumi dan gelombang tsunami merupakan musibah kolektif yang menimpa beberapa negara di Asia dan Afrika, salah satunya adalah Indonesia. Tepatnya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), gempa bumi dan gelombang tsunami telah meluluh lantakan wilayah tersebut. Bencana ini merupakan bencana terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Gelombang tsunami yang menimpa Aceh merupakan bencana kemanusiaan, karena bencana ini telah menimbulkan dampak negative yang sangat besar bagi umat manusia. Diantaranya banyak masyarakat Aceh yang meninggal dan hilang karena terseret amukan gelombang tsunami, anak-anak, orang dewasa, dan usia lanjut menjadi korban yang meninggal dan hilang.

dan rehabilitasi di Aceh. Bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah Saudi Arabia dalam rangka membantu rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh itulah yang menarik untuk dikaji. Oleh karenanya penulis ingin memaparkan dan menggambarkan mengenai bantuan yang diberikan pemerintah Saudi Arabia kepada Aceh. Ketertarikan penulis akan hal tersebut tertuang dalam sebuah rumusan yang tercantum dalam sebuah judul “ **Politik Luar Negeri Saudi Arabia Terhadap Indonesia (Studi Kasus: Bantuan Saudi Arabia kepada Aceh pasca bencana Tsunami tahun 2004).**”

B. Tujuan Penelitian

Penulisan ini juga sebagai tugas akhir kuliah dan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan Strata Satu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Penulisan ini juga sebagai karya ilmiah yang diharapkan berguna bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional untuk menjadi pembanding bahan bacaan dengan karya ilmiah lainnya.

Tujuan dari penulisan ini antara lain untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai politik luar negeri Saudi Arabia terhadap Indonesia dalam hal bantuan Saudi Arabia terhadap Aceh pasca bencana Tsunami 2004. .

C. Latar belakang permasalahan

Sebagai suatu bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain adalah suatu kebutuhan yang memang harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya dan memenuhi apa yang menjadi kepentingan nasional maupun hal lain yang mengiringinya.¹

Saudi Arabia merupakan wilayah yang memiliki kedaulatan atas negaranya. Wilayah negara ini meliputi empat perlima dari semenanjung Arab dan berada di lokasi yang strategis yang membentang dari Teluk Persia sampai laut Merah. Luas tanah Arab kira-kira 873.000 hektar atau sepertiga luas Amerika Serikat. Saudi berbatasan dengan Yordania, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman.²

Negara ini merupakan tempat tanah suci bagi umat islam, lahirnya agama islam serta tumbuh dan berkembangnya islam berpusat di negara ini. Sebagai bukti konkrit dari Saudi Arabia menjadi negara induk bagi umat muslim di seluruh dunia adalah bahwa Saudi Arabia menjadi tuan rumah atas dua tempat yang disucikan oleh umat muslim, yakni kota Makkah Al-mukarramah dan Madinah Al-munawwaroh.

Kemudian, Saudi Arabia adalah negara exportir minyak mentah terbesar di dunia. Dari hasil buminya itu, negara ini masuk kedalam kategori negara sangat kaya dan mampu membiayai proyek-proyek raksasa.

¹ Himma Maksalina, *Politik Luar Negeri Australia terhadap Indonesia pasca bom Bali dan Bom Kuningan* (Skripsi jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005) hal. 3

² Sidik Jatmika, *Bahan Ajar Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol. UMY, 2004. hal 156

Pertumbuhan pendapatan per capita penduduknya menempati urutan ke-4 dunia, hal ini tentu menjadikan negara ini menjadi salah satu negara termakmur di dunia.³ Kemakmuran yang dimiliki oleh Saudi Arabia ini mengakibatkan penduduknya mulai santai dan hidup lebih manja sehingga pemerintah harus mendatangkan tenaga kerja dari negara sahabat untuk membangun dan memanfaatkan pertumbuhan ekonominya. Diantaranya Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara sahabat dari Saudi Arabia yang banyak mengirimkan tenaga kerjanya. Hubungan yang terjalin diantara kedua negara terbilang baik-baik saja dan hampir tidak ada hambatan yang berarti. Meskipun letak geografis diantara kedua negara ini tidak berdekatan, namun hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Saudi Arabia sudah sangat erat. Bisa jadi hal ini disebabkan karena faktor adanya ikatan emosional yang terjalin diantara keduanya.

Jika menilik pada sisi historis, sebenarnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Saudi Arabia sudah terjalin jauh sebelum Indonesia memiliki kedaulatannya sendiri, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Masuknya agama islam di Indonesia sekitar tahun 674 M yang dibawa oleh Dinasti Umayyah dan para saudagar dari Arab, merupakan tanda terjalinnya hubungan kerjasama antara kedua negara ini.⁴ Dari situ hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Saudi Arabia terus berlanjut hingga sekarang.

Dilihat dari nilai perdagangan antara kedua negara, volume perdagangan Indonesia-Saudi Arabia pada periode Januari-September 2004

³ Editor: H.M. Iwan Gayo, *Buku Pintar: Seri Senior*, Pustaka Warga Negara, Jakarta, 2005. hal.432
⁴ <http://www.ummah.net/islam/nusantara/sejarah.htm>

mencapai US\$ 1.68 Milyar, meningkat sekitar 16,57% dibanding tahun 2003. Nilai ekspor ke Saudi Arabia mencapai US\$ 295.81 juta, turun 10,05%, dibanding tahun 2003. Komoditas ekspor Indonesia ke Saudi Arabia meliputi 16 komoditas, diantaranya kebutuhan tripleks, garmen, kertas, karton, furniture, ban mobil, buku tulis dan lain-lain.⁵ Sedangkan ekspor Saudi ke Indonesia adalah ekspor minyak mentah. Hampir 2,5% kebutuhan minyak dalam negeri Indonesia dipasok dari Saudi Arabia. Meskipun Indonesia merupakan negara penghasil minyak, namun pada kenyataannya negara ini masih membutuhkan import minyak mentah dari Saudi Arabia.

Hambatan yang di temui dalam hubungan Saudi-Indonesia tidak menjadi masalah yang cukup berarti. Terjadinya hambatan dan permasalahan yang muncul dikarenakan karena adanya perbedaan persepsi dan beberapa kasus yang dinilai oleh pihak Indonesia telah merugikan. Diantaranya kasus penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang acap kali terjadi, bahkan terkadang hingga berbuah kematian bagi para TKI yang mendapat tindakan penyiksaan oleh majikannya yang berasal dari Saudi Arabia sendiri.

Disamping beberapa permasalahan diatas, adanya perbedaan pandangan tentang politik luar negeri kedua negara bisa jadi memicu munculnya konflik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Saudi Arabia adalah negara Islam yang menjadi sekutu negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Efek dari persekutuan ini, tentu saja kebijakan-kebijakan politik luar negerinya yang terkadang merugikan negara-negara Islam lainnya, bahkan Indonesia

Sebagai contoh kasus yang terjadi dan dinilai dapat merugikan pihak RI adalah rencana pemerintah Saudi Arabia untuk memutuskan izin larangan terbang terhadap maskapai penerbangan RI ke wilayah Saudi. Rencana tindakan negara ini untuk melarang maskapai RI terbang dinegaranya adalah keputusan yang merujuk pada tindakan yang telah dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Saudi Arabia dengan negara-negara Uni Eropa (negara-negara barat) memiliki kedekatan yang nyata.

Akan tetapi meskipun ada beberapa permasalahan yang terjadi pada kenyataannya kedua negara tetap menjalin kerjasama yang erat sejak zaman dulu hingga sekarang. Dan hampir tidak pernah hubungan kedua negara ini berada dalam garis krisis. Disamping itu, Saudi Arabia juga menjadi salah satu negara yang secara awal mengakui kemerdekaan Indonesia.⁶

Terkait masalah politik luar negeri Saudi Arabia, negara ini mempunyai beberapa kebijaksanaan mengenai bantuan luar negerinya. Diantaranya program bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang dan miskin, khususnya negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim dan arab. Dalam hal ini, bantuan Saudi kepada Indonesia lah yang akan di paparkan, khususnya bantuan kepada Aceh pasca tsunami 2004.

Sebuah gempa bumi berkekuatan 9,0 pada skala Richter yang berpusat di Samudera Hindia yang kemudian diikuti oleh gelombang Tsunami dahsyat telah menghantam berbagai negara, seperti Indonesia, Thailand, Sri Lanka,

⁶ Aris Rahman, "Abdul Rahman Al-Khayyat: Hubungan Saudi Arabia-Indonesia sangat istimewa", *Madina online* 2007

India, Malaysia, dan beberapa negara di Afrika, bencana itu terjadi pada tanggal 26 Desember 2004.⁷ Hampir sebagian negara-negara Asia dan Afrika menjadi ladang amukan gempa bumi tektonik dan gelombang tsunami.

Salah satu negara yang paling merasakan dampak dari bencana ini adalah Indonesia. Dimana diwilayah Indonesia bagian barat yang menjadi korbannya. Yakni provinsi Aceh merupakan wilayah terparah yang terkena gelombang Tsunami selain pulau Nias di Sumatera Utara. Dengan jumlah korban kematian melampaui 137.000 jiwa dan lebih dari 150.000 orang harus kehilangan tempat tinggalnya menjadikan bukti bahwa wilayah Aceh adalah wilayah yang terparah.

Akibat bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, dampak yang ditinggalkan oleh bencana ini tentu saja sangat memprihatinkan. Selain jumlah korban meninggal ataupun hilang karena gelombang tsunami, kerusakan fisik dan infrastrukturpun melanda wilayah ini. Dengan porak porandanya provinsi ini, secara otomatis seluruh aktivitas di Aceh terhenti, baik aktifitas ekonomi, politik, pendidikan ataupun yang lainnya. Dari dampak yang demikian, masalah-masalah barupun muncul dan tentu saja hal ini menjadikan semakin kompleksnya permasalahan yang di hadapi Aceh.

Berbicara mengenai perekonomian Aceh, sebelum terjadinya bencana tsunami, perekonomian di propinsi ini didominasi oleh sector pertanian, migas, dan industri pengolahan. Struktur sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2003 mencapai lebih dari 28%, sektor migas dan industri pengolahan masing-masing

⁷ M.Abdul Ma'ruf, *Peranan Jepang dalam membangun Aceh Pasca Tsunami*, (Skripsi jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. 2005) hal. 3

mencapai hampir 20%.⁸ Terhentinya aktivitas perekonomian di Aceh akibat bencana tsunami tentu saja membawa dampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Diperkirakan antara 600 ribu-800 ribu (sekitar 25% dari total kesempatan kerja yang ada) orang kehilangan pekerjaan. Sektor perikanan yang memberikan lebih dari 130 ribu kesempatan kerja dan memberi kehidupan hampir 70% penduduk pantai, saat ini kehilangan pekerjaan.⁹ Dengan rusaknya beberapa infrastruktur yang ada dan matinya segala macam aktivitas perekonomian, tentunya kesempatan kerja pada sector lainnya pun kian hilang, dari segi perekonomian Aceh benar-benar terpuruk.

Penderitaan masyarakat Aceh yang demikian lama akibat konflik bersenjata yang cukup panjang, di tambah lagi dengan bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, telah menempatkan mereka pada posisi yang tragis. Akibat musibah ini, tingkat kemiskinan mencapai 33% dan pengangguran terbuka mencapai 11,2%. Jika termasuk setengah pengangguran, jumlah penganggur total mencapai sekitar 48%.¹⁰

Program-program rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh sangat diperlukan untuk mampu membangkitkan Aceh dari keterpurukan. Program tersebut tentunya harus mempunyai tujuan dan landasan yang benar agar semuanya dapat terwujud dengan baik. Demikian halnya dengan pembangunan kembali fasilitas-fasilitas umum, memberikan hunian yang layak bagi para korban, serta pendidikan. Jika program rekonstruksi dan rehabilitasi itu dapat

⁸ Lampiran 5, Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 30, Tahun 2005, *Tentang Rencana induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*. kbri-canberra.go.id

⁹ *Ibid*, Lampiran 5

¹⁰ *Ibid*,

terwujud sesuai harapan, bisa jadi program ini juga menjadi terapi penyembuhan bagi para korban tsunami itu.

Tentunya dengan melihat keadaan Aceh yang demikian, diperlukan suatu cara dan upaya untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi warga Aceh. Adapun masalah-masalah besar yang diakibatkan dari bencana gempa bumi dan gelombang tsunami antara lain, tingginya jumlah pengangguran akibat hilangnya lapangan pekerjaan yang disapu oleh gelombang tsunami, pemukiman penduduk yang tidak layak, pendidikan anak-anak yang terancam, serta banyak lagi permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut.

Tsunami yang memporak-porandakan beberapa bagian negara di belahan Samudra Hindia telah menarik perhatian yang serius. Perhatian masyarakat tidak hanya berasal dari masyarakat domestik saja, akan tetapi masyarakat internasional pun turut serta di dalamnya. Indonesia yang menempati wilayah terparah akibat tragedi tsunami, memperoleh perhatian yang cukup besar dari penjuru dunia.

Bantuan datang dari berbagai masyarakat internasional, bantuan internasional yang tiba di Indonesia berasal dari berbagai kalangan. Beberapa negara ikut memberikan perhatiannya kepada Indonesia, baik itu berasal dari negara sahabat dan lainnya. Tidak luput juga beberapa LSM, perusahaan asing, organisasi internasional, sipil, militer, tim medis dan masih banyak lagi bantuan yang mengalir dari masyarakat internasional untuk korban tsunami di

Beberapa negara yang bersimpatik dan menjadi negara donatur untuk Indonesia dalam upaya membantu pemerintah Indonesia dalam membangun Aceh kembali pasca bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Indonesia (Aceh) antara lain, Amerika Serikat, Jepang, Australia, Mesir, Libya, Pakistan, Singapura, Myanmar, Denmark, Inggris, negara-negara Uni Eropa, Uni Emirat Arab, RRC, Korea Selatan, Korea Utara, Kuwait, Jerman, Filipina, Irlandia, Iran, Selandia baru, Spanyol, Swiss, Thailand, Norwegia, Portugal, Polandia, Rusia, dan lainnya.

Namun hal yang menarik untuk dibicarakan dari beberapa negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia dalam upayanya membantu menanggulangi permasalahan Aceh pasca Tsunami adalah negara Saudi Arabia. Sebagai salah satu negara kaya, Saudi Arabia mempunyai andil terhadap rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Perhatian negara tersebut atas bencana tsunami yang telah meluluh-lantakkan Aceh cukup besar, baik dari pemerintah Saudi sendiri maupun masyarakatnya. Hal ini terbukti dari mengalirnya bantuan kepada Aceh yang disalurkan melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, dan pemerintah setempat.¹¹ Saudi Arabia memberikan janji kepada pemerintah Indonesia bahwa pemerintah akan memberikan bantuan dengan jumlah US\$ 800 Juta. Tentunya jumlah yang disebutkan itu merupakan jumlah yang sangat besar.

Menurut KBRI Riyadh, pemerintah Saudi Arabia telah memberikan bantuan bagi para korban bencana tsunami sebesar US\$10 juta. Dari jumlah

¹¹ Aris Rahman, "Abdul Rahman Al-Khayyat: Hubungan Saudi Arabia-Indonesia sangat istimewa", *Madina online* 2007

yang diberikan itu US\$2,5 juta diberikan kepada pemerintah Indonesia. Dari data yang telah di dapat, untuk meningkatkan jumlah bantuan tersebut, Raja Fahd telah menginstruksikan beberapa televisi dan surat kabar di Saudi Arabia agar mengorganisir seluruh dana bantuan yang akan diserahkan kepada para korban bencana tsunami di Aceh. Pada tanggal 10 Januari 2005, KBRI Riyadh telah mentransfer sumbangan tahap kedua sebesar US\$20.000.¹²

Bantuan berupa barang yang dikirimkan oleh Saudi Arabia kepada korban gempa bumi dan gelombang tsunami di Nangroe Aceh Darussalam pun dikirimkan, dimana bantuan itu tiba di bandara Hang Nadim Batam, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2005. Barang bantuan seberat 79 ton yang diangkut oleh pesawat Saudi Arabian cargo MD 11, terdiri dari karpet, pakaian, selimut, dan kurma. Bantuan dari Saudi Arabia ini dikirim secara bertahap pada 6, 9, 13, 15 Januari 2005, yang jumlah totalnya sekitar 400 ton.¹³

Pemerintah Saudi Arabia juga membantu US\$20,4 juta untuk berbagai fasilitas yang hancur karena gelombang tsunami yang menerjang Aceh. Enam proyek yang direncanakan oleh pemerintah Saudi Arabia itu dilaksanakan oleh Islamic Development Bank (IDB) yang dimulai pada tahun 2007, termasuk untuk rehabilitasi Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Hadir pada penandatanganan ini pihak IDB dengan kontraktor, Direktur Saudi Charity

¹² *Tempointeraktif.com*, "Pemerintah Arab Saudi kirimkan Bantuan untuk Aceh", Kamis, 6 Januari 2005, 10:32 WIB

¹³ *Ibid*,

Champaign Muhammad Ibrahim Al-Khalaf, Direktur IDB Regional Office Kuala Lumpur Ahmed Saleh Hariri.¹⁴

Untuk proyek renovasi Masjid Raya Baiturrahman ini dilakukan secara bertahap. Bantuan yang disalurkan oleh Saudi Charity champaign untuk tahap kedua sebesar US\$1 juta. Pada tahap pertama, bantuan yang telah dikucurkan guna untuk merehab dinding masjid, lantai yang retak dan membangun enam rumah untuk para imam. Sedangkan bantuan untuk tahap kedua, digunakan untuk membangun Laboratorium Bahasa Arab. Selain untuk merenovasi Masjid Raya Baiturrahman, lima paket bantuan lagi digunakan untuk pembangunan dua kompleks pantai asuhan yatim piatu sebesar US\$6 juta. Kemudian proyek pengeboran air bersih, pembersihan sumur, serta pengadaan mesin penjernihan air sebesar US\$1 juta. Pembangunan Medical Centre pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sebesar US\$1,5 juta, dan pembangunan 500 rumah untuk korban tsunami sebesar US\$9,9 juta.¹⁵

Adapun kepedulian yang ditujukan secara langsung oleh pemimpin Saudi Arabia pada saat kepemimpinan Raja Fahd Bin Abdul Aziz adalah dimana Raja Fahd mengajak para keluarga kerajaan untuk memberikan sumbangan secara langsung. Raja Fahd sendiri menyumbang 20 juta Riyal, kemudian Putra Mahkota Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz menyumbang 10 juta Riyal. Seorang pengusaha kaya Pangeran Waleed bin Talal menyumbang

¹⁴ *Ibid*,

70 juta Riyal, sebagai perinciannya 15 juta Riyal berupa uang tunai, sejuta set pakaian, 3000 tenda senilai 55 juta Riyal.¹⁶

Jika dijumlahkan secara keseluruhan bantuan yang diberikan oleh Saudi Arabia kepada Aceh memang bukan jumlah yang sedikit, bahkan bantuan yang diberikan ini merupakan bantuan terbesar yang diterima Aceh dari negara-negara penyumbang lainnya, khususnya dari negara-negara islam. Bantuan Saudi Arabia menempati posisi tertinggi sebagai negara penyumbang terbesar kepada para korban bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dibandingkan negara-negara islam dan arab lainnya.

Disamping itu, kucuran dana yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Aceh bersifat hibah. Bukan hutang luar negeri yang akan mendapatkan bunga dan jatuh tempo pada periode-periode yang akan datang, kemudian pemerintah Indonesia harus membayarnya. Adapun sumbangan dana itu berupa sumbangan dana tunai. Dan jika dibandingkan dengan sumbangan yang diberikan oleh Saudi kepada negara-negara korban lainnya, bantuan kepada Indonesialah yang menempati urutan teratas dalam jumlah terbanyak pemberian bantuan. (Lihat tabel 1.1)

Tabel 1.1
Perbandingan jumlah bantuan yang diterima oleh
Negara-negara korban Tsunami dari Saudi Arabia

No	Negara	Jumlah
1.	Indonesia	US\$ 50 Juta
2.	Malaysia	US\$ 30 Juta
3.	India	US\$ 10 Juta
4.	Sri Lanka	US\$ 10 Juta

Sumber: <http://www.hidayatullah.com/>

Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa niatan Saudi Arabia dalam membantu Indonesia dengan tujuan membangun kembali Aceh selain karena tujuan kemanusiaan, tentunya ada hal-hal lain yang mendorong negara ini memberikan bantuannya kepada Indonesia. Sebagai salah satu bukti adalah seperti yang telah dikatakan di halaman sebelumnya bahwa meskipun letak geografis antara kedua negara sangat berjauhan, akan tetapi ada satu ikatan emosional yang menjadikan negara ini mempunyai hubungan yang erat, yakni antara Saudi Arabia dengan Indonesia terikat dengan keyakinan yang sama yaitu Islam.

Bisa jadi karena faktor inilah yang mendorong negara Saudi Arabia berkeinginan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Indonesia dan tanpa adanya hambatan yang mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Selain karena faktor yang telah disebutkan diatas, tidak bisa dipungkiri nuansa politis juga tetap ada di dalamnya. Mengingat Indonesia merupakan mitra dagang yang berpotensi bagi Saudi Arabia. Maka Saudi ingin tetap menjalin hubungan bilateral yang telah ada.

Kemudian, faktor lainnya yang juga mempengaruhi kebijakan Saudi Arabia adalah bahwa negara ini ingin lebih memperkuat dan menjaga iklim investasinya di Indonesia. Tentu saja hal ini disebabkan karena Saudi Arabia mempunyai ketergantungan terhadap Indonesia dalam hal perdagangan, haji dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara itu. Sebagai contoh ketergantungan Saudi Arabia terhadap Indonesia adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak warganya melakukan jamaah haji.

Hal lain yang juga menjadi alasan mendasar yang mengakibatkan jumlah bantuan kepada Aceh jauh lebih besar karena Aceh merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya beragama islam. Di samping itu faktor ekonomi pun mengiringinya. Dimana selama ini, Saudi Arabia tidak mengalami defisit atas kerjasama ekonomi yang terjalin antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Jadi Saudi Arabia menginginkan tetap terjaganya kerjasama kedua negara.

Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya Saudi Arabia ingin tetap menjalin hubungan perekonomiannya dengan Indonesia, melalui momentum bantuan kemanusiaan kepada Aceh pasca terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami.

Selain maksud dan tujuan diatas, Saudi Arabia juga mempunyai kepentingan lainnya yakni dimana negara ini ingin menunjukkan pengaruhnya dikawasan regional maupun global dan berusaha membangun kepercayaan dan citra positif dimata masyarakat Indonesia maupun internasional dengan cara memberikan perhatian dan bantuan yang sangat besar kepada Indonesia, dalam hal ini provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

D. Pokok permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dan dengan mengingat keterkaitannya dengan judul ini, maka pokok permasalahan yang penulis ajukan adalah **Apa kepentingan nasional Saudi Arabia memberikan bantuan kepada Indonesia khususnya untuk Aceh Pasca bencana gempa bumi dan gelombang Tsunami pada tahun 2004?**

E. Kerangka dasar pemikiran

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan arah dan tujuan penelitiannya serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesanya. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti, tetapi merupakan suatu petunjuk hipotesis. Untuk menjelaskan Politik Luar Negeri Saudi Arabia terhadap Indonesia ini maka penulis menggunakan teori Politik Luar Negeri dan konsep Kepentingan Nasional. Kemudian untuk memperjelas mengenai uraian kepentingan Saudi Arabia terhadap Indonesia penulis juga menggunakan *Decision making theory*.

.Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, suatu negara harus mempunyai politik luar negeri. Dimana politik luar negeri ini meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan negara lain. Menurut K.J. Holsti Politik Luar Negeri adalah:

*"These are all foreign policy outputs: actions or ideas designed by policy makers to solve a problem or promote some change in the environment-that is in the policies, attitudes, or actions of another state or state."*¹⁷

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri merupakan :

*"A strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest. A specific foreign policy carried on by a state may be the result of an initiative by that state or maybe a reaction to initiatives undertaken by other state. Foreign policy involves a dynamics process of applying relatively fixed interpretations of national interest to the highly fluctuating situational factors of the international environment to develop a course of action, followed by efforts to achieve diplomatic implementation of the policy guidelines."*¹⁸

Dari definisi yang dikemukakan Plano dan Olton tersebut, terlihat ada empat unsur utama dalam politik luar negeri. Keempat unsur tersebut adalah strategi, actor-aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Jadi politik luar negeri bertujuan untuk mewujudkan tujuan, cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Terkait permasalahan yang diajukan, bantuan yang diberikan oleh Saudi Arabia kepada Aceh merupakan perwujudan dari upaya keinginan pemerintah Saudi Arabia untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Dari

¹⁷ K.J. Holsti, *International Politics a Framework for Analysis*, third edition, Prentice hall of India private limited, New Delhi, 1978. hal.

¹⁸ Roy Olton and Jack C. Plano, *The International Relations dictionary*, Holt, Rine hart and Winston, Inc. USA, 1969. hal. 127

beberapa pernyataan tentang definisi dari Teori Politik Luar Negeri, dapat di tarik garis merah bahwa ide-ide atau gagasan itu akan dapat terlaksana hanya melalui kebijakan Politik Luar Negeri suatu Negara. Dalam hal ini Saudi Arabia, ingin mewujudkan gagasan, ide, serta keinginan agar terciptanya stabilitas nasional yang baik melalui tindakan Politik Luar Negeri.

Sedangkan Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau adalah kelangsungan hidup negara.

“Kemampuan minimum negara adalah melindungi identitas fisik, politik dan budayanya dari gangguan negara lain. Dalam pengertian yang lebih spesifik, negara harus mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya, yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis atau komunis, serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistic, dan sejarah.”¹⁹

Kepentingan nasional umumnya di kenal sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui politik luar negeri. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah *“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision maker of state in making foreign policy.”*²⁰

Dari definisi diatas dapat diartikan tujuan mendasar serta factor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional.

Di dalam konsep kepentingan nasional, pada dasarnya konsep ini tidak hanya memikirkan bagaimana sebuah negara mampu mewujudkan kepentingan nasionalnya sendiri. Konsep ini juga mempertimbangkan prinsip kemanusiaan.

¹⁹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hal.141

²⁰ *Ibid*, Roy Olton and Jack C. Plano.hal.128

penting bagi Saudi Arabia untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Indonesia.

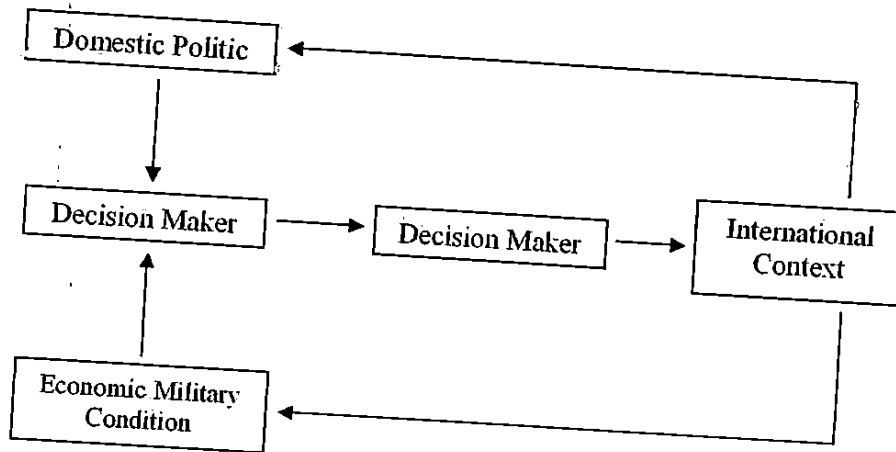
Hal ini disebabkan karena untuk masa-masa mendatang, kedua negara akan mengalami rasa saling ketergantungan hampir disegala bidang. Saudi Arabia sangat membutuhkan barang-barang mentah dan tekstil serta produk makanan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya.

Kekayaan sumber daya hayati dan non hayati yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu point yang menunjang agar terjalinnya hubungan perdagangan yang baik dan lancar antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Kemudian, menyinggung masalah haji, hampir sebagian besar jamaah haji berasal dari Indonesia. Dengan datangnya jamaah haji yang berasal dari Indonesia, dimana jamaah hajinya memiliki jumlah jamaah terbesar dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dari kerjasama ini, Saudi Arabia telah mampu mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari sektor ini. Keuntungan yang didapatkannya itu tidak hanya dirasakan oleh pihak kerajaan saja, melainkan pihak swasta pun ikut meraup keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh Saudi dari sektor haji, khususnya dari Indonesia ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Masalah lainnya yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah Saudi Arabia adalah mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia. Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya Saudi Arabia mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Indonesia.

Demi mencapai kepentingan nasional Saudi Arabia, maka dirumuskan pula Politik Luar Negeri William D. Coplin yang didalamnya menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan luar Negeri suatu negara. Untuk lebih memperjelas mengenai proses pengambilan keputusan, berikut ini dapat digambarkan dalam skema proses pengambilan keputusan menurut William D. Coplin.

PROESES PENGAMBILAN KEPUTUSAN LUAR NEGERI

(Menurut William D. Coplin)



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional,
Suatu Telaah Teoritis, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30

Berdasarkan skema diatas, dapat dijelaskan apa kepentingan nasional Saudi Arabia dalam membantu Aceh pasca bencana tsunami 2004. dimana tiga hal, yakni Politik Dalam Negeri, keadaan ekonomi dan militer, serta konteks internasional, sangat berpengaruh terhadap pembuat keputusan dalam menentukan kepentingan nasionalnya.

1. Politik Dalam Negeri Saudi Arabia

Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional suatu Negara adalah mengejar kekuasaan yaitu hal apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan pengadilan suatu negara atas negara lain. Ia juga menyatakan bahwa esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional.²² Maksudnya adalah bahwa politik luar negeri suatu Negara didasarkan pada kepentingan domestic, atau bahwa kepentingan luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional negara tersebut.

Melihat dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa politik dalam negeri Saudi Arabia pada dasarnya memiliki prinsip bahwa segala bentuk kepentingan nasionalnya merupakan awal terbentuknya kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, kebutuhan domestic bisa menjadi isu dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Keinginan yang sangat kuat oleh masyarakat Saudi untuk dapat membantu warga Aceh serta semakin melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, menjadikan pemerintah Saudi memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Aceh pasca terjadinya bencana tsunami tahun 2004.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer Saudi Arabia

A. Ekonomi

Saudi Arabia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kondisi ekonomi yang kuat di dunia. Saudi Arabia merupakan negara

²² Djamadi M. Anwar. *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia: Pengantar Untuk Mahasiswa Jurusan HI*, Jurusan HI UMY, 2005, hal. 52

yang memiliki $\frac{1}{4}$ cadangan minyak mentah dunia. Dari kepemilikan minyaknya ini, Saudi menjadi negara yang mampu memberikan kestabilan perekonomiannya pada rakyatnya. Saudi menjadi negara pengekspor utama minyak ke berbagai negara, diantaranya Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, bahkan Indonesia. Disamping sektor minyak, Saudi juga memiliki asset lainnya yang memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut, yaitu sektor jamaah haji dan Umroh.

Melihat kondisi perekonomian Saudi Arabia yang demikian kuatnya, tentu saja Saudi bisa melakukan apa saja demi mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Dengan tetap menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia, Saudi berharap mampu menguasai pasar di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar untuk meraup keuntungan yang besar pula. Maka ketika masyarakat Saudi ingin membantu rakyat Aceh saat wilayah ini mengalami bencana tsunami pada tahun 2004, di respon oleh pemerintah Saudi.

Disamping itu, kondisi alam Aceh yang di dalamnya memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan berpotensi, menjadikan salah satu faktor Saudi Arabia membantu rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh.

B. Militer

Saudi Arabia yang dikenal sebagai negara sekutu dari Amerika Serikat, tentunya memiliki kekuatan militer yang kuat. Hal tersebut

ditunjukkan dari kondisi militernya baik dari sumberdaya manusianya maupun dari segi peralatan-peralatan militer yang dimilikinya.

Tidak dipungkiri, kepemilikan kekuatan militer Saudi Arabia merupakan hasil dari hubungan eratnya dengan negara Adikuasa itu. Saudi juga mendapat perlindungan atas keamanan territorialnya dari Amerika Serikat. Kesepakatan antara kedua negara dalam rangka sama-sama mewujudkan kepentingan nasionalnya menjadikan negara ini memiliki basis kekuatan militer. Melihat dari kenyataannya tersebut, berkaitan dengan kepentingan Saudi Arabia terhadap Indonesia dapat dilihat bahwa Saudi ingin mendapat wilayah yang strategis di wilayah Asia Tenggara khususnya di Aceh yang wilayahnya terletak dipintu selat malaka. Selat yang dinilai memiliki keuntungan yang tinggi jika negara ini membangun pangkalan militernya di wilayah itu, seperti apa yang sering dilakukan oleh negara sekutunya yaitu Amerika Serikat.

3. Konteks Internasional

Saudi Arabia dalam pergaulan dunia internasional sejak dianggap tidak peduli atas apa yang dialami oleh ummat islam, merujuk pada peristiwa invasi AS ke Afghanistan, Konflik Israel-Palestina, dan Invasi AS ke Irak pada tahun 2003, sering memperlihatkan sikap bahwa sebenarnya Saudi Arabia peduli dengan ummat islam. Berbagai macam upaya dilakukan Saudi Arabia guna menampik tuduhan masyarakat internasional bahwa Saudi Arabia adalah negara bentukan Amerika Serikat, dan negara

kaya raya yang tidak mampu berbuat apa-apa jika saudaranya sendiri mengalami keterpurukan

Secara khusus, Saudi Arabia berupaya untuk membuktikan bahwa tuduhan masyarakat internasional itu salah. Saudi Arabia memanfaatkan bencana yang menimpa Aceh sebagai salah satu bentuk kepedulian Saudi Arabia terhadap ummat Islam.

F. Hipotesis

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dikemukakan, kemudian Pokok permasalahan, serta teori yang digunakan oleh penulis guna untuk mengetahui jawaban sementara dari permasalahan ini, maka penulis menyimpulkan bahwasannya Kepentingan Nasional Saudi Arabia dalam membantu Aceh, adalah:

1. Menjaga legitimasi tradisional religius pemerintah Saudi Arabia
2. Dengan memberikan bantuan kepada Aceh, kemakmuran ekonomi Saudi Arabia tetap stabil dan hubungan ekonomi dengan Indonesia akan tetap terjalin. Dalam hal perdagangan, haji dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga nantinya pembahasan tidak mengalami perluasan, yang bisa menyebabkan hasil dari

penulisan karya ilmiah menjadi rancu, kurang terfokus dan kurang ilmiah. Jangkauan penelitian dalam penulisan ini adalah bantuan Saudi Arabia ke Aceh pasca terjadinya bencana Tsunami 2004. Dengan penekanan isi dimulai dari banyaknya bantuan yang di berikan oleh Saudi Arabia kepada Aceh dan politik luar negeri Saudi Arabia terhadap Indonesia serta kepentingan-kepentingan nasional Saudi Arabia sendiri. Dimulainya bantuan Saudi Arabia ke aceh ini pada tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2007. Jadi penelitian ini mengambil data mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Namun tidak menutup kemungkinan digunakannya data-data yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan diatas diluar jangka waktu tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan penulis mengambil data diluar jangkauan penelitian diatas, selama data yang diperoleh sesuai dan bermanfaat bagi penulis.

H. Metode Pengumpulan Data

Dengan berdasar kerangka dasar pemikiran diatas, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data-data empiris. Penelitian ini menggunakan metode deduktif. Data-data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi literature. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data yang bersumber dari analisa data sekunder, seperti: Buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal Ilmiah, majalah, Surat Kabar, internet, maupun dokumen-dokumen

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini di bagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya akan membahas mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Menjelaskan Sistem Pemerintahan dan Dasar-dasar Politik Luar Negeri Saudi Arabia. Dalam hal ini akan menggambarkan tentang Politik Luar Negeri Saudi Arabia dan apa yang menjadi dasar dari Politik Luar Negeri Saudi Arabia itu sendiri. Di bab ini juga akan disampaikan bagaimana implementasi Politik Luar Negeri Saudi Arabia terhadap Indonesia.

Bab III Menjelaskan tentang terjadinya bencana tsunami pada tahun 2004 yang melanda Indonesia, khususnya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dimana Aceh benar-benar merupakan wilayah terparah, banyak korban yang berjatuhan. Dan infrastruktur di dalamnya juga ikut porak poranda. Dalam hal ini tentu saja Indonesia, khususnya Aceh mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan adanya bencana tersebut tentunya mengundang reaksi internasional.

Bab IV Akan menjelaskan tentang Kepentingan Saudi Arabia dalam memberikan bantuan kepada Aceh pasca tsunami 2004

Bab V Penutup. Bab ini merupakan akhir penulisan skripsi yang